

PENERAPAN DISPENSASI KAWIN PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA HAK ANAK

Rizka Nurkhabib

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing: Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan persoalan sosial-hukum yang masih mengemuka di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Bono, Kabupaten Tulungagung. Praktik ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap anak, tetapi juga berdampak serius pada terampasnya hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur serta menelaah strategi pencegahan yang diterapkan di tingkat lokal, khususnya oleh pemerintah Desa Bono. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif dan studi kasus sebagai desain utamanya. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, observasi, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik dispensasi kawin masih menjadi celah hukum yang kerap dimanfaatkan. Faktor penyebab dominan antara lain adalah konstruksi budaya patriarkal, keterbatasan akses pendidikan, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan efektif karena masih terdapat ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah desa, seperti edukasi dan penyuluhan, dinilai belum mampu mengubah cara pandang masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, pengetatan mekanisme dispensasi kawin, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perkawinan Dibawah Umur Hak Anak, Dispensasi Kawin. .

APPLICATION OF MARRIAGE DISPENSATION IN UNDERAGE MARRIAGES RESULTING IN THE LOSS OF CHILDREN'S RIGHTS

Rizka Nurkhabib

Master of Law Program University of Surabaya

Contributor: Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

ABSTRACT

Child marriage remains a significant socio-legal issue across various regions in Indonesia, including in Bono Village, Tulungagung Regency. This practice reflects not only the weakness of the child protection system but also results in the deprivation of fundamental rights, such as access to education, health, legal protection, and optimal development. This study aims to examine the forms of legal protection available for children involved in early marriage and to analyze the preventive strategies implemented at the local level, particularly by the Bono Village government. This research employs a socio-juridical approach with a qualitative method and a case study design. Data were collected through literature review, documentation, observation, and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that despite legal advancements—such as Law Number 16 of 2019, which raises the minimum legal age for marriage—loopholes remain through the practice of marriage dispensation, which is often misused. Dominant contributing factors include patriarchal cultural norms, limited access to education, social pressure, and unstable economic conditions. Legal protection for children is not yet effectively implemented due to the gap between legal norms and social realities. Preventive efforts by the village government, such as educational outreach and counseling, have not significantly shifted societal perceptions. Therefore, this study recommends strengthening legal policies, tightening the requirements for marriage dispensations, and fostering sustainable cross-sectoral collaboration to ensure comprehensive and equitable protection for children.

Keywords: Underage Marriage, Children's Rights, Marriage Dispensation

